



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2021**

**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN FLORES TIMUR
Jln. Ile Napo : Telp / Fax [0383] 2551234**

LARANTUKA

KATA PENGANTAR

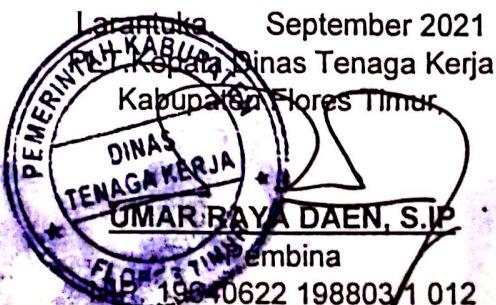
Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan yang Mahakuasa karena atas penyertaan dan penyelenggaraan ilahi-Nya, kami dapat menyelesaikan dan menyajikan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

Dokumen Perubahan RENJA Tahun 2021 ini memuat gambaran mengenai perubahan perencanaan pembangunan yang menjadi bagian dari Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur.

Dokumen Perubahan RENJA Tahun 2021 ini penting untuk merespon dinamika pembangunan daerah, khususnya di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian selama tahun berjalan. Salah satu hal penting yang menyebabkan perubahan mendasar pada pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD adalah wabah virus Covid 19. Sekitar 50 % anggaran Dinas Tenaga Kerja telah mengalami pergeseran untuk membiayai kegiatan penanganan wabah virus Covid 19. Kondisi ini menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian pada target kinerja dan anggaran karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau tetap dilaksanakan tetapi dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas.

Dokumen Perubahan RENJA Tahun 2021 ini merupakan bahan yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021. Rancangan Teknokratis dokumen ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini belum sempurna adanya. Untuk itu, kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaannya. Kami pun menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang dengan caranya telah membantu kami dalam proses penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ini. Kiranya kerja sama yang baik tetap terjalin demi tercapainya Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk mewujudkan Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun, Kota Menata.



DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSDUD DAN TUJUAN	1
1.3. LANDASAN HUKUM	1
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	2
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021	4
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	8
BAB IV PENUTUP	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembangunan pemerintah. Perencanaan menjadi landasan yang menentukan arah gerak pembangunan. Dengan demikian, perencanaan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang baik, terarah dan terukur demi terwujudnya visi dan misi pemerintah.

Perencanaan pembangunan nasional di tiap tingkatan pemerintahan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mengatur tahapan perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Lebih lanjut ketentuan ini telah dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan RENJA Tahun 2021 ini merupakan bahan yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021. Perubahan pada penetapan target kinerja dan anggaran OPD yang dilakukan untuk merespon kondisi strategis yang terjadi selama tahun berjalan juga akan mempengaruhi perubahan pada target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021. Perubahan RENJA ini memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang telah disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan kondisi strategis yang melatarbelakangi perubahannya.

1.2 Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud disusunnya Perubahan RENJA adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penganggaran dan Pengawasan dengan memperhatikan kondisi-kondisi strategis yang mempengaruhi perubahan terhadap target awal Perangkat Daerah.
- 2) Adapun tujuan penyusunan Perubahan RENJA adalah sebagai acuan bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur dalam menyusun Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun berpedoman pada beberapa landasan hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 97);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur.
9. Peraturan Bupati Flores Timur , Nomor: 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat tentang gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RENJA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 meliputi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

Bagian ini memuat pengukuran dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 yang dijabarkan dalam tiga pembahasan, antara lain Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-isu Strategis yang Dihadapi Dinas Tenaga Kerja.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 yang merupakan bagian pokok dari penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja ini.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini merupakan kesimpulan akhir dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan sebuah organisasi yang akuntabel perlu dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitasnya dengan melakukan klarifikasi atas *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai.

Pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan evaluasi sebagaimana dimaksud mencakup 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) SKPD yang merupakan tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur melaksanakan 6 (Enam) program, 11 (sebelas) kegiatan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja digunakan instrumen standart pengukuran ordinal dengan skala pengukuran kinerja, yaitu :

86-100%	= Baik Sekali (BS)
71-85%	= Baik (B)
56-70%	= Cukup (C)
0-55%	= Kurang (K)

Standar pengukuran kinerja tersebut di atas digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Tenaga Kabupaten Flores Timur. Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur keadaan per 30 Juni 2021 (Triwulan II), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

LAMPIRAN : Evaluasi Kesiapan Penyelenggaraan Lingkup Kelompok/Kelas SEMESTER I (TRIWULAN I DAN II TAHUN 2021)

1.07.3.01.070 115.02	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pemot Kaja	Jumlah Pemot Kaja yang Mengikuti Bimtek dan Kelompok yang di Dampingi (orang/kelompok)	2.01		Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Usaha Kemandirian	2.316.845.600		1.064.645.600	120	206.638.600										1.064.645.600	48		
1.07.2.01.070 116.06	Program Pengembangan Kompetensi Kaja	Perseentase Pengembangan Tugas kerja (%)	2.01	01	Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Usaha Kemandirian	2.316.845.600	350	1.064.645.600	120	206.638.600									350	1.064.645.600	48		
1.07.2.01.070 116.09	Kemajuan Jalan Raya	Jumlah Penyelesaian Tugas kerja (orang)	2.01	04	Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Usaha Kemandirian	11.913.202.040		7.623.202.040		1.278.385.500									2.360.000	2.360.000	64		
1.07.3.01.070 116.10	Pembukaan Jalan Baru	Jumlah Penyelesaian Tugas kerja (orang)	2.01		Pembangunan Pelajar Migran Indonesia Purna Penetapan	4.016	8.916.283.340	2.864	6.016.283.340	333	919.285.000								2.260.000	2.260.000	64		
1.07.2.01.070 116.10	Ketersamaan Kebijakan dan Perilaku Terhadap Kerja Indonesia	Jumlah Dokumen Kajaman antar Daerah (dokumen)	2.01	04	Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Calon Pelajar Migran Indonesia (PMI) Pelajar Migran Indonesia (PMI)	4	1.060.000.000	2	310.000.000	1	206.000.300							2	310.000.000	50	48		
1.07.2.01.070 117	Program Perbaikan dan Pengembangan Lembaga Keterampilan kerja	Perseentase Perbaikan dan Pengembangan Lembaga Keterampilan kerja (%)	2.01	05	Program Industri	100	1.463.409.000	62	892.409.000		272.085.000							10.590.000	10.590.000	62	54		
1.07.3.01.070 117.02	Pembinaan Pengetahuan dan Pengembangan Industri	Jumlah Penyelesaian tugas Pengetahuan Industri (kamus)	2.01	05	Peningkatan dan Penyempurnaan Pengetahuan Industri, Migrasi kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.662.409.000		892.409.000		272.083.000								10.390.000	10.390.000	54			
1.07.3.01.070 117.04	Konsolidasi Berbagai Peraturan Perundang-Untung Keterampilan	Turikamanya Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-Untung Keterampilan (peraturan)	2.01	03	Peningkatan Pengetahuan Industri, Migrasi kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berkaitan Dengan Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50	568.614.600	39	328.614.600	15	37.495.000							4.080.000	11	332.694.600	118	39	
1.07.3.01.070 117.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Jumlah Dokumen UMP,THR dan Data KHL (dokumen)	2.01	03	Pengelenggaran Verifikasi dan Rekayasaan Keunggulan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pelajar/Serikat Buruh serta non affiliasi	144	344.732.700	60	284.732.700	30	40.000.000							60	284.732.700	42	53		
		- Turikamanya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Survey KHL, Pembinaan UMP, THR, Perbaikan Sistem Kerja, Pembinaan Serikat Pelajar / Serikat Buruh, Perbaikan Pengetahuan DPLK Keterampilan) (Pemerintah/Perserikatan / Serikat Pelajar)	2.01	03	Pengelenggaran Pengetahuan Industri, Migrasi kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berkaitan Dengan Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	244	549.041.700	64	279.041.700	6	97.293.000							6.310.000	6.310.000	64	281.331.700	36	53
			2.01	03	Uraian																AHV/RI		
3.03	Transaksi		2.01	03		2.320.000.000		1.470.000.000		324.300.000										1.470.000.000	63		

Kode Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Warga Transmigrasi Baru (UPT)	Jumlah Penduduk yang berada di dalam kota/kabupaten/kota	Program Pembangunan Komunitas Transmigrasi	Jumlah Warga Transmigrasi Baru (UPT)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 7+8+9+10	13 = 8+9+10	14 = 12+13	15 = 13+14	16 = 12+13+14		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
3.32.2.41.070 1.14.04	Pembentukan dan pengembangan Persemaian Sosial dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah warga transmigrasi baru yang dilengkapi (UPT)	3.32.03.01.01		Program Pembangunan Komunitas Transmigrasi	Jumlah Penduduk Penduduk yang berada di dalam kota/kabupaten/kota	1	300,000,000																
		Ambil saran dari Persemaian Sosial dan Kesejahteraan Keluarga yang dilengkapi (UPT)	3.32.03.01.01.02			Peningkatan Penduduk yang berada di dalam kota/kabupaten/kota	1	300,000,000																
3.32.2.41.070 1.14.04	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah Kolonopik dalam UPT yang dilengkapi (Gelengpok)	3.32.03.04		Program Pembangunan Komunitas Transmigrasi	Jumlah Kolonopik dalam UPT yang dilengkapi (Gelengpok)	74	770,000,000	12	400,000,000	12	180,000,000								12	400,000,000	14	52	
		Jumlah kolonopik untuk warga transmigrasi lokal (Ormas)	3.32.03.04.02			Peningkatan Sensus Penduduk pada Tahun Komisariat	3.32.1	770,000,000	120	400,000,000	12	180,000,000								120	400,000,000	4	52	
						Peningkatan Infrastruktur Sosial, Element dan Keterintegrasi dalam Rangka Kemandirian Sertai Pemukiman	3.32.2	770,000,000	120	400,000,000	84	180,000,000								120	400,000,000	4	52	
						Jumlah Kolonopik dalam UPT yang dilengkapi (Gelengpok)	74	1,050,000,000	8	370,000,000	8	44,310,000								8	370,000,000	11	54	
						Jumlah Penduduk Penduduk yang berada di dalam kota/kabupaten/kota	1	1,050,000,000	20	370,000,000	20	44,310,000								20	370,000,000	1	54	
3.32.2.01.070 1.14.04	Pembentukan Warga Transmigrasi Lokal	Jumlah keturunan warga transmigrasi lokal (Ormas)	3.32.03.03		Program Pembangunan Komunitas Transmigrasi	Jumlah Keturunan Penduduk yang berada di dalam kota/kabupaten/kota	1	1,050,000,000	28	370,000,000	150	44,310,000									28	370,000,000	1	54
			3.32.03.03.02			Jumlah Penduduk Penduduk Lokal	2.870	1,050,000,000																
3.32.2.01.070 1.14.04	Sosialisasi Persemaian Rasa Toleransi Keterintegrasi dan Kemandirian Sertai Pemukiman	Ambil saran Persemaian Rasa Toleransi Keterintegrasi dan Kemandirian Sertai Pemukiman (Ormas)	3.32.03.01.01.02																					



2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan regulasi di atas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur menangani 2 (dua) urusan, yaitu urusan wajib Tenaga Kerja dan urusan pilihan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1) Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur antara lain :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, dengan 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- c. Bidang Bina Tenaga Kerja, dengan 2 (dua) seksi, yaitu :
 - Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
 - Seksi Bina Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, dengan 2 (dua) seksi, yaitu :
 - Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
 - Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja.
- e. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi, dengan 2 (dua) seksi, yaitu :
 - Seksi Pembinaan Transmigrasi.
 - Seksi Pemberdayaan Transmigrasi.

2) Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lebih lanjut, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur dapat diuraikan, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijaksanaan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- Pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- Pelaksanaan administrasi dinas;
- Pembinaan, pengordinasian dan pengendalian urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
- Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekertaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup dinas.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- Penyusunan program dan anggaran;
- Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara / daerah;
- Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Bina Tenaga Kerja

Bidang Bina Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Bina Tenaga Kerja. Bidang Bina Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :

- Penyusunan Rencana Kerja Bina Tenaga Kerja;
- Perumusan kebijakan teknis Bina Tenaga Kerja;
- Pelaksanaan program dan kegiatan Bina Tenaga Kerja;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bina Tenaga Kerja;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana kerja hubungan industrial dan syarat kerja;
- Perumusan kebijakan teknis hubungan industrial dan syarat kerja;
- Pelaksanaan program dan kegiatan hubungan industrial dan syarat kerja;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan hubungan industrial dan syarat kerja; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi

Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- b. Sekretariat
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekertaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup dinas.
- Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - Penyusunan program dan anggaran;
 - Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara / daerah;
 - Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Bina Tenaga Kerja
- Bidang Bina Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Bina Tenaga Kerja.
- Bidang Bina Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :
- Penyusunan Rencana Kerja Bina Tenaga Kerja;
 - Perumusan kebijakan teknis Bina Tenaga Kerja;
 - Pelaksanaan program dan kegiatan Bina Tenaga Kerja;
 - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bina Tenaga Kerja;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
- Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan rencana kerja hubungan industrial dan syarat kerja;
 - Perumusan kebijakan teknis hubungan industrial dan syarat kerja;
 - Pelaksanaan program dan kegiatan hubungan industrial dan syarat kerja;
 - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan hubungan industrial dan syarat kerja; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi
- Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
- Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
- Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepegawaian

Dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur didukung oleh sejumlah pejabat dan staf sebagai pelaksana. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur sebanyak 18 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan :
 - Jabatan Struktural : 10 orang.
 - Jabatan Fungsional Umum : 8 orang.
- b) Jabatan Struktural bedasarkan jenjang eselonering :
 - Eselon II : - orang.
 - Eselon III : 4 orang.
 - Eselon IV : 6 orang.
- c) Pegawai berdasarkan jenjang kepangkatan :
 - Golongan IV : 4 orang.
 - Golongan III : 11 orang.
 - Golongan II : 3 orang.
 - Golongan I : - orang.
- d) Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan :
 - Magister (S2) : - orang.
 - Sarjana (S1) : 9 orang.
 - Diploma : 2 orang.
 - SLTA : 7 orang.

2.3 Isu-isu Strategis yang Dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur, antara lain:

1. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang menangani urusan tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
3. Rendahnya jumlah kesempatan kerja yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka.
4. Sulitnya mencari daerah lokasi transmigrasi untuk calon transmigran.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**TABEL
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN FORES TIMUR
TAHUN 2021**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/(BERKURANG) ANGGARAN DALAM (RUPIAH)	KET
										LOKASI	TARGET	ANGGARAN	LOKASI	TARGET	ANGGARAN		
			1			2	3			6	4	5	6		11		
1						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
2-7	3- 32	0-0	01			DINAS TENAGA KERJA						3,003,108,270				2,120,993,844	(882,114,426)
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/						922,789,170				1,989,856,044	1,067,066,874
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			100		922,789,170				1,989,856,044	1,067,066,874
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100							
							Tersedianya Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen)			8							
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Larantuka (OPD)		30,000,000	Larantuka (OPD)			24,525,000	(5,475,000)	Refocusing
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renja, RKA, DPA, DPAP, LAKIP, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan) (dokumen)		Larantuka (OPD)	7	30,000,000	Larantuka (OPD)	7		24,525,000	(5,475,000)	
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					38,627,850				1,588,432,400	1,549,804,550	
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)					Larantuka (OPD)	14		1,543,360,400	1,543,360,400	
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan (bulan)		Larantuka (OPD)	12	38,627,850	Larantuka (OPD)	12		45,072,000	6,444,150	Refocusing
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah					303,695,320				95,094,448	(208,600,872)	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/(BERKURANG) ANGGARAN DALAM (RUPIAH)	KET
									LOKASI	TARGET	ANGGARAN	LOKASI	TARGET	ANGGARAN		
		1			2	3			6	4	5	6		11		
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor (jenis)			Larantuka (OPD)	5	7,992,020	Larantuka (OPD)	5	5,001,948	(2,990,072)	Refoc using;
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (unit)			Larantuka (OPD)	8	72,150,000	Larantuka (OPD)		-	(72,150,000)	
x	xx	01	2.06			Tersedianya Peralatan Gedung Kantor ((unit))				4	26,605,000			-	(26,605,000)	
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor (jenis)			Larantuka (OPD)	25	2,500,000	Larantuka (OPD)	25	1,639,500	(860,500)	Refoc using;
x	xx	01	2.06			Tersedianya Alat Tulis Kantor (jenis)				50	25,000,000		50	17,888,000	(7,112,000)	Refoc using;
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar, buku)			Larantuka (OPD)	50300	17,800,000	Larantuka (OPD)	31791	11,250,000	(6,550,000)	Refoc using;
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan Praturan Peundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (jenis)			Larantuka (OPD)	3	2,395,800	Larantuka (OPD)	1	900,000	(1,495,800)	Refoc using;
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman (OK) (dos)			Larantuka (OPD)	300	10,125,000	Larantuka (OPD)	250	15,000,000	4,875,000	Refoc using;
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar dan kedalam daerah (kali)			Larantuka (OPD)	67	139,127,500	Larantuka (OPD)	22	43,415,000	(95,712,500)	Refoc using;
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tersedianya Sarana dan prasarana aparatur					81,680,000			-	(81,680,000)	
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)			Larantuka (OPD)	3	58,650,000	Larantuka (OPD)	0	-	(58,650,000)	
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan meubeler	Jumlah Bulan pelayanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)			Larantuka (OPD)	11	23,030,000	Larantuka (OPD)	0	-	(23,030,000)	
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)					338,135,400			214,357,800	(123,777,600)	
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)			Larantuka (OPD)	12	825,000	Larantuka (OPD)	12	1,500,000	675,000	Refoc using;
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan pelayanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)			Larantuka (OPD)	12	19,719,500	Larantuka (OPD)	12	19,509,800	(209,700)	Refoc using;

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/(BERKURANG) ANGGARAN DALAM (RUPIAH)	KET	
										LOKASI	TARGET	ANGGARAN	LOKASI	TARGET	ANGGARAN			
			1			2				6	4	5	6		11			
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)			Larantuka (OPD)	23	317,590,900	Larantuka (OPD)	20	193,348,000	(124,242,900)	Refocusing	
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						130,650,600				67,446,396	(63,204,204)	
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pelayanan jasa perijinan kendaraan dinas / operasional (unit)			Larantuka (OPD)	8	38,627,850	Larantuka (OPD)	5	4,500,000	(34,127,850)	Refocusing	
							Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional (unit)				5	37,897,750		5	45,389,596	7,491,846		
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terawatnya gedung kantor (gedung)			Larantuka (OPD)	2	40,000,000	Larantuka (OPD)	2	9,956,800	(30,043,200)	Refocusing	
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung/ Kantor (unit)			Larantuka (OPD)	22	11,375,000	Larantuka (OPD)	18	4,900,000	(6,475,000)	Refocusing	
x	xx	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung / Kantor (unit)			Larantuka (OPD)	5	2,750,000	Larantuka (OPD)	5	2,700,000	(50,000)		
2	07					Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						1,756,009,100				115,196,400	(1,640,812,700)	
2	07	03				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)				50	208,638,600				-	(208,638,600)	
2	07	03	2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						208,638,600				-	(208,638,600)	
2	07	03	2.01	01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Bimtek dan Kelompok yang didampingi (orang, kelompok)			Larantuka-Ibukota kabupaten	120	208,638,600	Larantuka-Ibukota kabupaten			-	(208,638,600)	
2	07	04				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga kerja (%)				100	1,275,285,500				63,175,500	(1,212,110,000)	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/(BERKURANG) ANGGARAN DALAM (RUPIAH)	KET	
										LOKASI	TARGET	ANGGARAN	LOKASI	TARGET	ANGGARAN			
		1		2		3				4	5	6	7	8	9	10		
2	07	04	2.04			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (orang)					1,275,285,500				63,175,500	(1,212,110,000)	
2	07	04	2.04	01		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Daerah (dokumen)			Larantuka-Ibukota kabupaten	1 dokumen	206,000,500	Larantuka-Ibukota kabupaten	1		51,780,500	(154,220,000)	Refoc using,
2	07	04	2.04	03		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja. (orang)-->Seminiasi			Kel. Ritaebang,Le woglarang, Waiklibang, Kolilanang,Sinarhadi, Riangkotek, Blepanawa,s arotari, Amagaapati,Mokanar ak,Lewobunga(Adotim), Makanar I	535	919,285,000	Kel. Ritaebang,Lewoglarang, Waiklibang,Kolilanang,Sinarhadi, Riangkotek, Blepanawa,s arotari, Amagaapati,Mokanar ak,Lewobunga(Adotim)	0		9,495,000	(909,790,000)	Refoc using,
							Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja. (orang)-->Pembukaan Jalan Baru			Desa Ipi ebang (Adotim), Desa Bugalima (Adobar), Desa Lewoloba (Ile Mandiri)	126	150,000,000	Desa Ipi ebang (Adotim), Desa Bugalima (Adobar), Desa Lewoloba (Ile Mandiri)	0		1,900,000	(148,100,000)	Refoc using,
2	07	05				Program Hubungan Industrial	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)					272,085,000				52,020,900	(220,064,100)	
2	07	05	2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						272,085,000				52,020,900	(220,064,100)	

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG ANGGARAN DALAM (RUPIAH)	KET
										LOKASI	TARGET	ANGGARAN	LOKASI	TARGET	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang- undangan tentang Ketenagakerjaan (perusahaan) - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Survey KHL, Pembinaan UMP, THIR, Perbaikan Syarat Kerja; Pembinaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh; Pembinaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) (Pasar / Perusahaan / Serikat Pekerja)			Larantuka - Ibukota Kabupaten	30	40,000,000	Larantuka - Ibukota Kabupaten	9	18,287,100	(21,712,900)	Refocusing	
2	07	05	2.02		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian kasus Perselisihan hubungan Industrial (kasus)		19 Kecamatan	84	97,295,000	19 Kecamatan	0	-	(97,295,000)	Refocusing		
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konsederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta non afiliasi	- Jumlah Dokumen UMP,THIR dan Data KHL (dokumen)		Larantuka- Ibukota kabupaten	6	97,295,000	Larantuka-Ibukota kabupaten	1	16,471,200	(80,823,800)	Refocusing		
3	32				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					324,310,000				15,941,400	(308,368,600)		
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kelompok dalam UPT yang diberdayakan			20	144,310,000				-	(144,310,000)		
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					144,310,000				-	(144,310,000)		
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi yang dibangun. (Unit)		Desa Narasaosina (UPT Purinara)	1	100,000,000		0		-	(100,000,000)		

KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)		PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/(BERKURANG) ANGGARAN DALAM (RUPIAH)	KET
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	1	2	3	LOKASI	TARGET	ANGGARAN	LOKASI	TARGET	ANGGARAN	LOKASI	TARGET	ANGGARAN		
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah Sosialisasi Peraturan Hukum Ketransmigrasian (orang, kali)		Kec. Adonara, Wittihuma, Ulo Lemo	250	44,310,000		0			11		(44,310,000)	
3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Wilayah Transmigrasi Baru				180,000,000					15,941,400	(164,058,600)	Refoc using.	
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian					180,000,000								
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah bantuan untuk warga transmigrasi lokal (paket)		UPT Purinara, UPT Tana Meang, UPT Libu, UPT Watapao kab. Flores Timur	64	180,000,000	UPT Purinara, UPT Tana Meang, UPT Libu, UPT Watapao kab. Flores Timur	0		15,941,400	(164,058,600)			



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan tersebut dilakukan karena terdapat kondisi / keadaan tertentu yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Program / Kegiatan Perangkat Daerah. Dengan demikian, perubahan tersebut merupakan rasionalisasi terhadap target kinerja dan anggaran Perangkat Daerah berdasarkan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian target-target tersebut.

Perubahan RENJA Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021. Salah satu hal penting yang menyebabkan perubahan mendasar pada pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD adalah wabah virus Covid 19. Sekitar 50 % anggaran Dinas Tenaga Kerja telah mengalami pergeseran untuk membiayai kegiatan penanganan wabah virus Covid 19. Kondisi ini menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian pada target kinerja dan anggaran karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau tetap dilaksanakan tetapi dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Tenaga Kerja sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi dalam 6 (enam) bulan ke depan. Di samping itu, dokumen ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengembangkan Visi dan Misi Daerah serta Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah menuju masyarakat Flores Timur yang Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata.

